Ekonomi Biru dan Kepemimpinan Strategis: Mendorong Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

By Surya Bakti, Lukman Nuzul Hakim

WORD COUNT 4931 TIME SUBMITTED 27-DEC-2023 11:25AM
PAPER ID 105760579

Ekonomi Biru dan Kepemimpinan Strategis: Mendorong Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Surya Bakti[1], Lukman Nuzul Hakim[2*]

lukmannuzulhakim@gmail.com

[1]STIE Muhammadiyah Kisaran, [2]STIE Muhammadiyah Kalianda

Abstrak

Introduction

Penerapan Ekonomi biru berkelanjutan, yang mencakup sumber makanan, obat-obatan, dan energi terbarukan baru, semakin dipandang penting bagi masa depan kemanusia. Pekerjaan Panel Tingkat Tinggi untuk Ekonomi Laut Berkelanjutan telah banyak menggambarkan perlunya tindakan cepat untuk melestarikan kemampuan laut untuk memberikan nilai ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan mengingat jawaban kuat laut terhadap masalah dunia. Wilayah Indonesia yang fantastis memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi biru. Penggunaan sumber daya laut dan pesisir yang berkelanjutan adalah komponen kunci dari kelangsungan dan kesuksesan yang sehat di kawasan ini karena begitu banyak orang di wilayah ini bergantung padanya. Hal ini membutuhkan tindakan kolaboratif untuk menciptakan dampak signifikan pembangunan ekonomi biru untuk penghidupan yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, serta sumber daya laut dan pesisir yang berkualitas dan berkelanjutan.(Sambodo et al. 2023)

Pelaksanaan Ekonomi Biru di Indonesia memiliki signifikansi yang penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Ekonomi Biru merupakan konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Ekonomi biru bertujuan untuk lebih mengontekstualisasikan tantangan dan menanggapi masalah ini dengan tepat di lautan.(Cisneros-Montemayor et al. 2022).

Istilah ekonomi biru pertama kali dibahas sekitar tahun 2012. Ekonomi biru yang sejajar dengan ekonomi hijau (ekonomi yang bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan).(Cisneros-Montemayor et al. 2022). Dalam lanskap pembiayaan ekonomi biru, konteks saat ini berkaitan dengan bagaimana sektor ekonomi biru terstruktur, kekuatan dan kelemahan, motivasi berbagai pemangku kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan ekonomi biru. (Tirumala and Tiwari 2022)

Ekonomi biru ialah istilah yang dipakai untuk merujuk pada seluruh sektor ekonomi yang berhubungan dengan kelautan serta sumber daya yang ada di laut. Dengan mengikutsertakan berbagai kegiatan seperti perikanan, kelautan, pariwisata pantai, pengelolaan lingkungan laut, dan berbagai usaha yang terkait dengan lautan. Ekonomi biru bertujuan untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di lautan sambil mempertahankan keberlanjutan lingkungan laut.

Potensi sumber daya laut Indonesia sangat potensial mengingat negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia hal ini memberikan bukti bahwa potensi sumberdaya laut yang melimpah untuk di kelola dengan penerapan blue economy sehingga diharapkan dapat berdampak pada keberlanjutan potensi hasil laut yang ada. Ekonomi biru mengacu pada penggunaan laut dan sumber daya terkait secara berkelanjutan untuk pengembangan ekonomi sambil melindungi ekosistem. dan didefinisikan sebagai model ekonomi berbasis laut yang menggunakan infrastruktur hijau serta teknologi dan mekanisme pembiayaan yang inovatif, dan pengaturan kelembagaan proaktif untuk memenuhi tujuan dem melindungi lautan dan pantai kita dan meningkatkan potensi kontribusi mereka terhadap pembangunan berkelanjutan, termasuk meningkatkan kesejahteraan manusia, dan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis". (Tirumala and Tiwari 2022).

Masyarakat pesisir pantai di seluruh wilayah di Indonesia menggantungkan penghidupannya pada sumber daya laut, diharapkan penerapan blue economy dapat menjaga kelestarian sumber daya pesisir untuk kepentingan pangan dengan tetap menjaga keberlanjutan ecosistem laut. Konsep ekonomi biru telah berkembang dan dipraktikkan dan implikasinya terhadap komitmen iklim, kesetaraan, dan keadilan pada skala yang berbeda. Ini melibatkan eksplorasi inkonsistensi antara wacana ekonomi biru tingkat tinggi dan perencanaan dan implementasi ekonomi biru regional. (Fusco, Schutter, and Cisneros-Montemayor 2022).

Kepemimpinan Strategis, sebagaimana terbukti dari berbagai definisi dan konseptualisasi kepemimpinan strategis yang ada dalam literatur. Selain itu, fragmentasi lapangan yang cukup besar dan kurangnya serangkaian temuan yang kohesif menyoroti kebutuhan untuk menyajikan definisi kepemimpinan strategis yang lebih menarik dan untuk mengatur lapangan melalui kerangka kerja integratif yang menunjukkan peluang untuk penelitian di masa depan. (Samimi et al. 2022)

Kami mengatasi kebutuhan ini dengan menawarkan kerangka kerja kepemimpinan strategis yang komprehensif dan integratif dan beberapa arah untuk pencarian ulang di masa depan. Pekerjaan kami dimotivasi oleh pertanyaan-pertanyaan penting tentang apa itu kepemimpinan strategi, apa yang dilakukan pemimpin strategis, mengapa mereka melakukannya, dan bagaimana mereka melakukannya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kami mengatur tinjauan kami dalam hal fungsi kepemimpinan strategis, atribut pemimpin strategis, hasil tingkat perusahaan yang dipengaruhi oleh pemimpin strategis, teori dan mekanisme yang menghubungkan pemimpin strategis dengan hasil ini, dan faktor kontekstual yang memoderasi hubungan ini. (Samimi et al. 2022)

Kepemimpinan strategis mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berlekanjutan dan memastikan bahwa kelestrarian lingkungan tetap menjadi tujuan utama. Pemimpin strategis diharapkan mampu melihat potensi sumber daya laut secara berkelanjutan untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat dan memanfaat potensi laut sebagai objek yang dimanfaatan sebagai mata pencaharian yang utama bagi masyarakat pesisir. kepemimpinan strategis yang menawarkan kerangka kerja yang disusun di sekitar pertanyaan essential tentang apa itu kepemimpinan strategis, apa yang dilakukan pemimpin strategis, mengapa mereka melakukannya, dan bagaimana mereka melakukannya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kami mengatur tinjauan kami di sekitar delapan fungsi yang dilayani oleh para pemimpin strategis, atribut kunci dari para pemimpin strategis, teori-teori yang digunakan para sarjana untuk menghubungkan fungsi-fungsi dan atribut-atribut ini dengan hasil, faktor-faktor

kontekstual, dan hasil organisasi yang dipengaruhi oleh para pemimpin strategis. (Samimi et al. 2022)

Perencanaan dan implementasi strategis untuk mengembangkan ekonomi biru harus menjadi aksi untuk mengembangkan ekonomi biru. Pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak pada hasil penerapan ekonomi biru dan dengan cara memetakan potensi – potensi yang ada dengan informasi yang akurat dan mengambil langkah – langkah strategis dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat agar dapat dengan maksimal mengelola sumber daya laut dengan baik dengan inovasi dan dukungan tekonologi terbarukan.

Pemimpin strategis mempengaruhi organisasi melalui keputusan yang mereka buat (Hambrick &; Mason, 1984). Tidak seperti keputusan yang dibuat pada tingkat yang lebih rendah atau ganisasi, keputusan pemimpin tehadap alokasi besar sumber daya dan komitmen yang dapat memiliki implikasi jangka panjang bagi perusahaan (Wang et al., 2016). Mengikuti premis ini, para sarjana telah mengeksplorasi peran para pemimpin strategis dalam membuat berbagai keputusan strategis (misalnya, berkaitan dengan inovasi, akuisisi, perubahan strategis, atau diversifikasi). Penelitian yang mengeksplorasi fungsi ini menyimpulkan bahwa berbagai motivasi memandu proses pengambilan keputusan strategis dan bahwa keputusan tersebut memiliki implikasi penting bagi hasil tingkat perusahaan (Wowak et al., 2017).(Samimi et al. 2022)

Komitmen pemerintah indonesia dalam penerapan blue economy ditandai kerjasama Indonesia dengan Swedia sepakat untuk menerapkan blue economy sebagai potensi ekonomi yang dapat digunakan untuk pemulihan dari pandemi Covid-19. Penerapan blue economy di sektor perikanan, pariwisata bahari, dan energi terbarukan memiliki potensi untuk menghasilkan dampak positif secara sosial dan ekonomi. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan nilai mata rantai pasok (supply chain) untuk kemudian dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.

Peran kepemimpinan strategis tentunya sangat diharapkan sebagai bentuk komitmen dalam rangka memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kepemimpinan strategis dapat secara komprehensif digambarkan sebagai kepemimpinan yang berfokus pada konsekuensi strategis (misalnya, ekonomi, lingkungan, sosial) untuk organisasi (misalnya, perusahaan multinasional, usaha kecil dan menengah), yang dapat didorong oleh tugas-tugas yang mencakup tetapi melampaui visi strategis, merangkum berbagai tugas administratif (tata kelola), keterlibatan, inovasi (peningkatan), operasional, dan pengawasan tingkat tinggi untuk suatu organisasi tanpa terbatas pada apa pun gaya kepemimpinan (misalnya, otentik, otokratis, birokratis, demokratis, transaksional, transformasional, pelayan) atau nilai (misalnya, menghargai diri sendiri, memandang orang lain).(Singh et al. 2023)

Faktanya saat ini masih banyak tantangan terhadap penerapan ekonomi biru di indonesia. Ekploitasi sumber daya alam yang di lakukan oleh para nelayan terhadap hasil laut yang secara berlebihan dan hal ini bisa berdampak pada ekosistem laut, perlu adanya upaya pendidikan bagi nelayan agar lebih kreatif terhadap pemanfaatan hasil laut agar eksploitasi besar-besar dapat di optimalkan sehingga penangkapan yang berlebihan dapat dikurangi. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang edukasi ekonomi biru secara menyeluruh di setiap daerah oleh pemerintah, sosialisasi yang konsisten dan terus menerus diharapkan dapat menghasilkan konsep ekonomi biru terlsakan dalam rangka pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian, dalam penelitian ini metode yang digunakan dengan pendekatan studi pustaka, tujuan penelitian ini untuk melihat sejauhmana peran kepemimpinan strategis dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi biru dalam strategi organisasi dalam merencanakan dan menetapkan setiap kebijakan yang diambil. data yang di dapat dari penelitian ini bersumber dari pengumpulan data pustaka melibatkan kegiatan pengumpulan sejumlah jurnal penelitaian, buku, majalah dan sumber pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian membaca, mencatat dan mengelola bahan penelitian dari sumber-sumber pustaka yang telah dikumpulkan.

Analisis dan diskusi

Analisis Kebijakan Ekonomi Biru di Indonesia

Studi tentang kebijakan ekonomi biru di Indonesia, konsep ekonomi biru yang melibatkan pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan sebagai sumber utama pencaharian nelayan dengan upaya tetap menjaga kelestarian hayati dan biota laut dengan pemanfaatan yang baik dengan penangkapan ikan yang tidak merusak alam laut agar keberlanjutan dapat terjaga. Pemerintah telah menerapkan kebijakan ekonomi biru dengan melakukan pelarangan terhadap penangkapan yang berlebihan dan eksploitasi secara besar-besaran dengan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem laut. Berbagai pelatihan yang telah di laksanakan dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi biru, di dukung dengan kebijakan dan regulasi agar tujuan ekonomi biru di pastikan dapat terlaksana karena telah ada rambu dan batasan yang telah ditetapkan.

Beberapa kebijakan yang telah di lakukan pemerintah indonesia dalam melaksanakan program ekonomi biru yaitu :

1. **Blue Finance Policy Note** : Kebijakan ini merupakan hasil kolaborasi Bappenas dengan World Bank. Kebijakan ini didasarkan pada laporan Oceans for Prosperity Bank Dunia (Bank Dunia, 2021), yang mengidentifikasi sektor-sektor prioritas untuk terlibat dalam keuangan biru :
   1) Perikanan berkelanjuta (termasuk akuakultur)
   2) Wisata pesisir dan bahari
   3) Mengelola aset pesisir dan laut (khususnya kawasan konservasi laut)
   4) Memerangi limbah khususnya limbah plastik.

   Semua sektor ini mengalami kesenjangan pembiayaan dan sangat membutuhkan modal dan dana operasional untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dengan melihat kondisi alam sebagai dasarnya.
2. **Sustainable Development Goals Security Framework :** Kerangka kerja ini menghasilkan SDG Bond (surat utang berbentuk sukuk). Pada tahun 2021 pemerintah Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menerbitkan Obligasi SDG di pasar modal utang global mengumpulkan EUR 500 juta (USD 548 juta). Dana hasil obligasi ini digunakan untuk membiayai proyek – proyek sosial dan lingkungan.
3. **Blue Economy Development Framework :** Kerangka kerja ini menjadi acuan kegiatan ekonomi biru. Bank Dunia telah meluncurkan BEDF untuk membantu

mengembangkan perubahan negara wilayah pesisir dalam rangka menuju ke ekonomi biru yang berkelanjutan dalam rangka membangun ketahanan terhadap perubahan iklim. Kerangka kerja merupakan seperangkat alat analisis dan bantuan teknis untuk membantu negara-negara menentukan peta jalan menuju ekonomi maritim yang beragam dan berkelanjuta yang berfokus pada bidang perikanan, akuakultur, budidaya laut, pariwisata pesisir, bioteknologi kelautan dan energi laut. Kerangka kerja ini bertujuan untuk memerangi kemiskinan dan mempercepat kemakmuran dengan menumbuhkan ekonomi biru.

4. **Blue Financing Strategy :** Strategi ini merupakan hasil kolaborasi Bappenas dengan Kemenko Marves. Strategi ini merupakan dikenal sebagai pembiayaan biru yang mana merupakan inovasi pembiayaan guna pengembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang merupakan target pencapaian visi Indonesia Maju 2045. Pada tahun 2045 sektor maritim diharapkan dapat menyumbang 12,5% terhadap PDB. Agar kegiatan ini dapat terlaksana maka bantuan untuk pendanaan kebutuhan sektor maritim periode 2020-2024 diperkirakan mencapai 4,3 miliar dollar AS, sedangkan dari pemerintah melalui APBN hanya dapat membantu pembiayaan 20 sampai 25 persen dari kebutuhan dana tersebut. Bappenas juga berencana mengambil langkah konkret seperti menyusun Pedoman Instrumen Keuangan Indonesia Biru, yang merupakan gabungan dari kebijakan dan strategi yang disusun oleh Kementrian PPN/Bappenas dan Kemenko Marves. Kebijakan ini akan dijadikan panduan bagi pengembangan instrumen pembiayaan inovatif di sektor maritim.

5. **Blue Bond** : Penerbitan Blue Bond memiliki manfaat dalam rangka membantu mengembangkan ekonomi biru yang berkelanjutan dengan memberikan pembiayaan untuk permasalahan kelautan dengan solusi pembiayaan berbasis energi bersih, transportasi dan sistem pangan, juga mendukung pelestarian ekosistem laut dan meningkatkan kesehatan laut. Kebijakan ekonomi biru juga masuk meliputi cakupan dan efektifivitas kawasan konservasi perairan denagn zona reskriftif dan pemberdayaan masyarakat lokal, pengurangan sampah laut. Penataan pemanfaatan ruang laut untuk melindungi ekosistem pesisir dan laut juga pengendalian aktivitas pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dengan menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir demi kesejahteraan nelayan, menjaga daya dukung lingkungan dan budidaya berkelanjutan yang ramah lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat juga menjadi bagian dari kebijakan ini.

Analisis dampak kebijakan terhadap pembanguan berkelanjutan

Laporan Bank Dunia terbaru yang berjudul **Laut untuk Kesejahteraan: Reformasi untuk Ekonomi Biru di Indonesia**, menjelaskan tentang status, tren, dan peluang menuju ekonomi biru di Indonesia. Dalam laporan tersebut, rekomendasi disajikan berdasarkan upaya dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Laporan tersebut juga memaparkan bahwa masa depan sektor kelautan bergantung kepada aset alam – ekosistem laut dan pesisir – yang sehat.(AQUINO 2021b)

3

Indonesia merupakan negara maritim dan luas laut Indonesia diperkirakan mencapai 5,8 juta km2. Perairan Indonesia baru mengeksploitasi sekitar 59% dari total potensi perikanan atau sumber daya kelautan Indonesia. Menurut data BPS, Indonesia merupakan negara terbesar ketiga di dunia yang memiliki garis pantai terpanjang. Dalam karunia ini ada banyak potensi untuk sumber daya hayati dan non-hayati. Lautan yang luas ini menyediakan komoditas ekspor utama berupa makanan laut. Perikanan merupakan komoditas unggulan, karena banyak negara maju yang sangat tertarik dengan komoditas ikan ini. Berikut ini empat usulan strategi utama bagi Indonesia untuk menjalankan transisi menuju ekonomi biru

1. Peningkatan pengelolaan aset laut dan pesisir (perikanan, mangrove, terumbu karang)
   Indonesia telah mengembangkan sistem wilayah pengelolaan perikanan sebagai struktur bagi pengambilan keputusan penting terkait tingkat panen untuk sektor perikanan. Secara konseptual, sistem ini baik, namun pelaksanaannya tetap membutuhkan anggaran, sumber daya manusia, dan rencana pengelolaan untuk mencegah berkurangnya stok ikan, termasuk memastikan batas panen yang jelas berdasarkan sains dan data yang memadai. Indonesia juga telah menyusun rencana tata ruang laut dengan mengidentifikasi wilayah laut yang sesuai untuk kegiatan ekonomi, dan wilayah laut yang tetap harus dilindungi. Integrasi antara rencana tata ruang laut ini dengan sistem perizinan usaha kini diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan yag dilakukan telah mematuhi peraturan zonasi. Sistem “scorecard” dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan dan merencanakan implementasi pembangunan, dengan berbagai indikator yang mengukur status sumber daya pesisir dan laut, seperti luas mangrove dan kualitas terumbu karang. Dalam jangka panjang, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk menyiapkan kadaster bagi kawasan laut dan pesisir (spatial title registry) guna menghindari konflik tata guna wilayah laut dan pesisir. Indonesia dapat menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan yang "berbasis hak", yang menopang praktik-praktik terbaik di sektor perikanan di dunia. Dalam sistem ini, pemerintah memberikan hak panen kepada masyarakat yang tinggal di kawasan pantai atau memberikan hak panen kepada perusahaan hingga jumlah tertentu dalam batas panen. Pengaturan seperti ini menjadikan para nelayan sebagai salah satu pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan perikanan, mendorong pengelolaan yang baik, dan meningkatkan produktivitas. Indonesia dapat melengkapi target restorasi mangrove yang ambisius - 600.000 hektar pada tahun 2025 - dengan kegiatan konservasi yang lebih kuat. Kegiatan restorasi perlu dilengkapi dengan langkah-langkah untuk mengurangi dan pada akhirnya dapat menghentikan kehilangan hutan mangrove alami. Perluasan moratorium konversi hutan primer yang juga meliputi mangrove akan sangat bermanfaat; Indonesia dapat mulai merancang diterapkannya pembayaran berbasis hasil untuk karbon yang tersimpan dalam biomassa dan tanah dari hutan mangrove yang luas, dan memastikan manfaat ini mencapai masyarakat pesisir untuk memberikan insentif bagi pengelolaan mangrove yang berkelanjutan.
2. Mobilisasi insentif dan investasi
   Peningkatan layanan dasar dan infrastruktur dasar dalam pengumpulan sampah, layanan air, dan pembuangan limbah diperlukan untuk mengelola dampak lingkungan terhadap daerah pesisir, meningkatkan layanan dasar dan kualitas hidup masyarakat pesisir, serta melindungi destinasi wisata dari kerusakan. Investasi yang dibutuhkan akan sangat besar, tetapi pengalaman di tingkat global menunjukkan bahwa potensi

imbal hasil yang diperoleh dari pembangunan infrastruktur seperti ini sangat tinggi (Panel Tingkat Tinggi untuk Ekonomi Laut Berkelanjutan, 2020). Akan tetapi, infrastruktur semata tidak dapat mengatasi masalah sampah. Dalam jangka panjang, ekonomi biru Indonesia akan membutuhkan ekonomi sirkular yang mengurangi sampah sejak awal. Upaya ini meliputi kebijakan yang menaikkan harga plastik, insentif bagi inovasi dan daur ulang, dan perubahan perilaku untuk mengurangi penggunaan plastik. Peraturan Pemerintah mengenai Perluasan Tanggung Jawab Produsen dapat dilengkapi dengan sistem pengembalian deposit, standar untuk bahan daur ulang, persyaratan kandungan daur ulang minimum, dan memprioritaskan bahan daur ulang dalam pengadaan publik.

3. Sistem yang lebih baik untuk pengumpulan dan pemantauan data
   Bentang laut Indonesia yang kompleks membutuhkan adanya sistem informasi terperinci dan tepat waktu bagi pengelolaan perikanan, ekosistem, dan dampak dari kegiatan manusia. Dibutuhkan perluasan cakupan survei untuk mengumpulkan informasi stok dan panen bagi spesies tertentu, seiring dengan percepatan peluncuran sistem pemantauan dan pelaporan elektronik. Kesepakatan tentang metode yang konsisten dalam konteks pemantauan ekosistem dan berbagi data juga diperlukan. Data yang lebih baik akan menguntungkan sektor pariwisata. Pemantauan dampak lingkungan dapat diperluas ke destinasi wisata populer untuk mendeteksi masalah dan menyediakan informasi dalam pengambilan langkah-langkah mitigasi secara tepat waktu.
4. Membangun kembali dengan “lebih biru" setelah pandemi COVID-19
   Terdapat peluang untuk menyelaraskan upaya pemulihan ekonomi jangka pendek pasca COVID-19 dengan kebutuhan jangka panjang di sektor kelautan. Sistem pengelolaan kunci — seperti rencana tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan perikanan — dapat diuji dan diterapkan saat ini, ketika tekanan sedang berkurang. Konteks tersebut juga memberikan pemerintah waktu untuk mengatasi berbagai tantangan. Paket pemulihan ekonomi dapat dikembangkan untuk membuka lapangan pekerjaan seraya memperkuat ketahanan pesisir, antara lain melalui aktivitas restorasi pesisir dan laut yang bersifat padat karya, seperti restorasi mangrove dan pembersihan pantai di daerah yang sangat bergantung kepada sektor pariwisata, dan investasi pada infrastruktur desa yang dibutuhkan.

Bank Dunia mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan strategi ekonomi biru melalui berbagai jenis investasi, seperti Program Lautan Sejahtera, investasi untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat pesisir dan memulihkan ekosistem kritis, Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang – investasi selama 20 tahun bagi pengelolaan dan penelitian terumbu karang, serta Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB), yakni sebuah platform untuk perencanaan dan infrastruktur pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan. Bank Dunia juga memberikan dukungan teknis melalui Indonesia Sustainable Oceans Program, melengkapi upaya peningkatan kapasitas dan basis pengetahuan terkait ekonomi biru. Melalui berbagai upaya di atas dan berbagai kegiatan lainnya, Indonesia dapat mewujudkan ekonomi biru untuk generasi sekarang dan mendatang.(AQUINO 2021b)

Komposisi ekonomi laut Indonesia berbeda dari negara-negara ASEAN dan Asia Timur Pasifik lainnya. Ekonomi laut Indonesia didominasi oleh perikanan tangkap laut, budidaya perikanan dan pengolahan ikan. Perikanan laut, akuakultur, dan pengolahan ikan menyumbang 83 persen dari nilai tambah yang dihasilkan dari enam sektor berbasis

laut yang diukur (perikanan tangkap laut, akuakultur, pengolahan ikan, pembangunan kapal, transportasi penumpang maritim dan angkutan laut). Pada tahun 2015, 84 persen nilai tambah yang dihasilkan dari pengolahan ikan laut di negara-negara ASEAN disebabkan oleh Indonesia, seperti halnya 73 persen perikanan tangkap laut, dan 54 persen budidaya laut. Indonesia juga menghasilkan nilai tambah terbesar dari angkutan laut (USD 2,6 miliar) dan angkutan penumpang maritim (USD 2,2 miliar) di antara negara-negara ASEAN pada tahun 2015. (AQUINO 2021a)

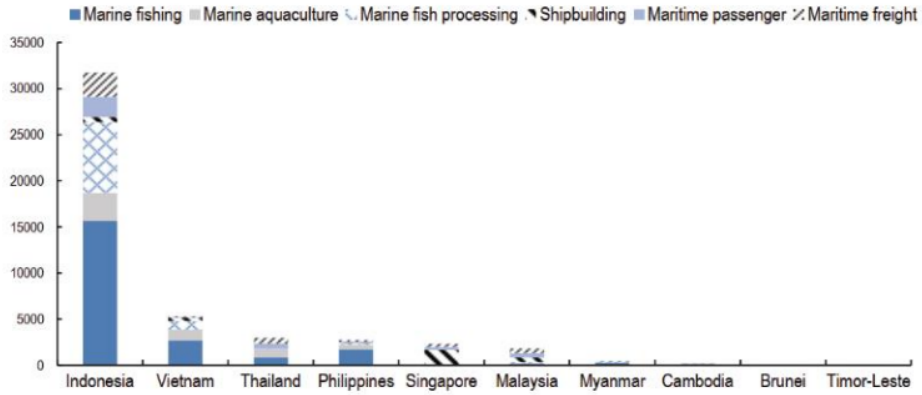

Gambar 1. Nilai Tambah Ekonomi Laut di Negara-negara ASEAN Tahun 2015

Sumber : Kementerian Bappenas (Sambodo et al. 2023)

Dampak kebijakan yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan perubahan yang berarti bagi perkembangan ekonomi biru di Indonesia. Pemulihan ekonomi biru yang berbasis pada pengembangan ekonomi biru berkelanjutan memiliki potensi untuk mengubah sektor berbasis laut yang sudah mapan dan yang baru muncul menjadi katalis untuk kemakmuran bersama jangka panjang. (Sambodo et al. 2023).

Upaya untuk terus memastikan bahwa pengembangan ekonomi biru yang sedang di laksanakan dapat berlangsung untuk generasi sekarang dan generasi mendatang.

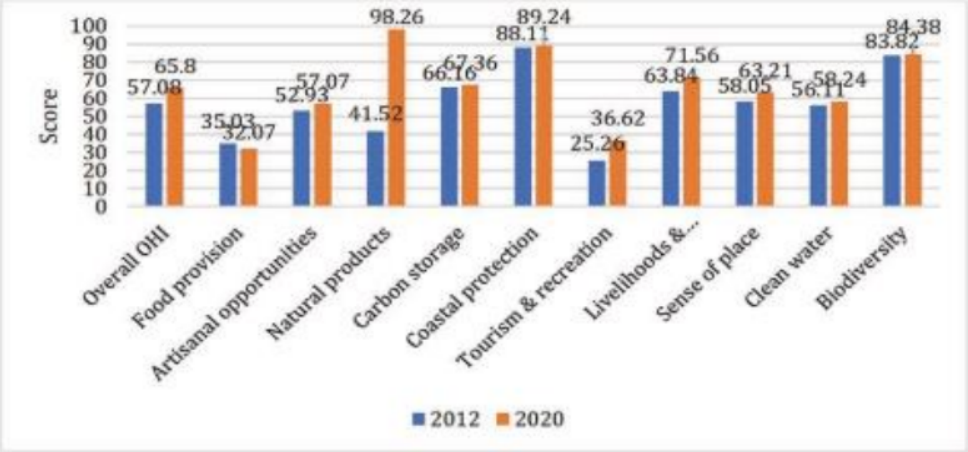

Gambar 2. Skor Indeks Kesehatan Laut (OHI) untuk Indonesia

Sumber : Kementerian Bappenas (Sambodo et al. 2023)

Pengelolaan ekonomi biru kelautan Indonesia yang terus berkembang akan memberikan dampak pada perbaikan ekosistem laut. Perencanaan dan pelestarian ekosistem laut dengan menjaga agar lautan indonesia tetap bersih dari sampah, hal ini akan berdampak pada perkembangan hasil perikanan Indonesia. Degradasi ekosistem menurunkan nilai jasa ekosistem laut untuk perikanan, pariwisata, dan pelayaran komersial, serta menghambat fungsi ekonomi penting lainnya: perlindungan masyarakat. Pada saat yang sama, Indonesia masih dalam perjalanan untuk mencapai SDG 14 Kehidupan di Bawah Air, yang menyiratkan kebutuhan integral untuk menyeimbangkan pemanfaatan ekonomi dengan menjaga lingkungan dan kebutuhan masa depan.(Sambodo et al. 2023)

Kepemimpinan Strategis Dalam Pembangunan Ekonomi Biru

Peran pemimpin dalam pengembangan ekonomi biru dapat dilihat dari kebijakan yang di ikuti oleh strategi yang di implementasikan oleh pemerintah dalam pembangunan ekonomi biru. Pernyataan Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dengan Menteri Lingkungan dan Iklim Swedia Per Bolund dan Menteri Infrastruktur Swedia Thomas Eneroth yang ditandatangani pada Senin (25/10) di Stockholm, Swedia, menyatakan komitmen kerja sama dalam mengembangkan *Blue Economy* di Indonesia.

Komitmen tersebut berlanjut dalam Pekan Kemitraan Keberlanjutan Swedia-Indonesia 2021 pada Kamis (25/11) melalui peluncuran Buku *Blue Economy Development Framework for Indonesia's Economic Transformation* atau Kerangka Pembangunan Ekonomi Biru untuk Transformasi Ekonomi di Indonesia. "Buku ini disusun Kementerian PPN/Bappenas bersama *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) sebagai acuan pemangku kepentingan dalam mendefinisikan ekonomi biru sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif. Potensi *Blue Economy* diperkirakan mencapai USD 1,33 miliar dan mampu menyerap 45 juta lapangan kerja," ujar Menteri Suharso. Kerangka Pembangunan Ekonomi Biru ini merupakan penjabaran dari amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia (RPJPN) 2005-2025, khususnya mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat, maju, dan tangguh melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia (RPJMN) 2020-2024 yang menekankan pentingnya pengelolaan kelautan dengan baik untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan. (Sambodo et al. 2023)

Kementerian PPN/Bappenas tengah menyusun roadmap atau Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia dengan dukungan dari mitra lokal dan internasional, termasuk UN Resident Coordinator, International Labour Organization, UN Environment Programme, PRISE+ Indonesia, dan EcoNusa Foundation. (Ade Miranti Karunia et al. 2022)

Peta jalan tersebut berupaya untuk menjembatani transisi ke ekonomi biru yang lebih berkelanjutan melalui konservasi dan penggunaan sumber daya laut dan pesisir yang bertanggung jawab untuk memberi manfaat bagi generasi mendatang, serta menjadi pedoman kebijakan dan program untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045, termasuk harapan untuk keluar dari middle income trap sebelum 2045. (Ade Miranti Karunia et al. 2022)

Studi tentang kebijakan dan strategi yang di implementasikan pemerintah dalam pembangunan ekonomi biru

Pemerintah Indonesia saat ini sedang fokus menerapkan prinsip ekonomi biru dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan di wilayah pesisir dan laut. Prinsip tersebut diklaim Pemerintah sebagai prinsip ideal dan terbaik untuk saat ini. (M Ambari 2023). Diharapkan penerapan ekonomi berdampak terhadap pertumbuhan ekosistem yang ada di laut. Sumber daya alam yang ada dilaut dan pesisir diharapkan akan tumbuh sebagai jalan peningkatan ekonomi masyarakat. Klaim tersebut berulang kali dikampanyekan oleh semua institusi dan pejabat Negara. Tak terkecuali, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menjadi penggagas pembangunan di pesisir dan laut dengan prinsip ekonomi biru.(M Ambari 2023).

Pembangunan ekonomi biru di Indonesia memiliki dampak yang signifikan, terutama dalam menjaga kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan. Berikut adalah beberapa dampak dari kebijakan dan strategi ekonomi biru :

1. **Peningkatan Pengelolaan Aset Laut dan Pesisir :** Indonesia telah mengembangkan sistem wilayah pengelolaan perikanan sebagai struktur bagi pengambilan keputusan penting terkait tingkat panen untuk sektor perikanan. Ini membantu dalam menjaga kesehatan dan produktivitas laut Indonesia.
2. **Kontribusi Ekonomi :** Sektor perikanan memberikan kontribusi sebesar 27 milliar dollar AS terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyediakan 7 juta lapangan pekerjaan.

3. **Perlindungan Lingkungan :** Terumbu karang dan mangrove berperan penting dalam mencegah dampak bencana alam seperti banjir dan tsunami. Perlindungan yang diberikan oleh terumbu karang dan mangrove ini bernilai setidaknya 639 juta dollar AS per tahun.
4. **Pengurangan Sampah Laut :** Sampah di laut berdampak buruk terhadap sektor pariwisata, perikanan, logistik, dan ekosistem di Indonesia, dengan kerugian mencapai lebih dari 450 juta dollar AS per tahun. Dengan kebijakan dan investasi yang tepat, Indonesia dapat mengatasi tantangan ini.
5. **Pembangunan Berkelanjutan :** Pemerintah Indonesia fokus untuk mengembangkan ekonomi biru melalui lima strategi yang dilaksanakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tujuan utama dari penerapan lima strategi ini adalah untuk menerapkan pemeliharaan ekosistem perikanan bisa tetap sehat.
6. **Pemulihan Ekosistem :** Salah satu strategi yang dijalankan adalah memulihkan ekosistem kelautan yang selama ini terganggu. Upaya tersebut dilakukan dengan melaksanakan perluasan kawasan konservasi perairan yang diharapkan bisa mencapai luasan 32,5 juta hektare pada tahun 2030.

Provinsi yang telah menerapkan konsep ekonomi biru dan memberikan dampak dan manfaat yaitu :

1. Provinsi Bali telah menerapkan konsep ekonomi biru dan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. (Budhiana 2023)
2. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pulau Lombok di NTB menjadi pulau percontohan untuk melaksanakan konsep pembangunan berbasis ekonomi biru. (Ambari 2017)

Konsep ekonomi biru di laksanakan dalam upaya mengembangkan sektor perekonomian dari pariwisata bahari, transportasi laut, perikanan dan konservasi laut. Pelaksanaan konsep ekonomi biru diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan akan pemanfaatan potensi sumberdaya laut dengan tetap memperhatikan kebutuhan penyelamatan ekologi yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Kebijakan ekonomi biru telah membawa dampak perubahan yang begitu berguna dalam tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Beberapa dampak dari penerapan ekonomi biru tersebut adalah :

1. Peningkatan pengelolaan sumber daya. Kebijakan ini telah mendorong peningkatan pengelolaan aset laut dan pesisir, termasuk perikanan, mangrove dan terumbu karang
2. Pembangunan berkelanjutan. Ekonomi biru merupakan alternatif baru bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif.
3. Tantangan yang Masih Ada. Meskipun ada kemajuan, tantangan seperti overfishing, kurangnya pengawasan terhadap armada penangkapan ikan domestik berskala kecil, dan kondisi terumbu karang yang kurang baik masih perlu diatasi.
4. Potensi Untapped: Dengan kebijakan dan investasi yang tepat, Indonesia memiliki potensi untuk mengatasi tantangan ini dan memperoleh manfaat yang lebih besar dari sektor kelautan.

Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi biru telah membawa dampak positif bagi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia, tetapi masih ada ruang untuk peningkatan dan optimisasi lebih lanjut.

Dalam rangka penerapan peningkatan dan pengembangan berkelanjutan melalui ekonomi biru dan kepemimpinan strategis di wilayah pantai di Indonesia perlu melakukan beberapa hal agar kebijakan ini dapat terealisasi.

1. Peningkatan pengawasan dan regulasi. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan regulasi terhadap aktivitas perikanan untuk mencegah overfishing dan melindungi ekosistem laut.
2. Investasi dalam penelitian dan pengembangan dapat membantu menciptakan teknologi dan metode baru yang lebih efisien dan berkelanjutan untuk memanfaatkan sumber daya laut.
3. Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat pesisir tentang pentingnya konservasi dan manajemen sumber daya laut yang berkelanjutan.
4. Kemitraan strategis dengan sejumlah negara – negara dan organisasi internasional lainnya agar dapat membantu berbagi pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya laut.
5. Pengembangan infrastruktur di daerah pesisir pantai, seperti fasilitas alat tangkap ikan dan cara pengolahan yang diharapkan dapat membantu masyarakat pesisir untuk memanfaatkan sumber daya laut secara lebih efisien dan berkelanjutan.
6. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya laut dengan memberikan akses terhadap pengelolaan sumber daya laut agar dapat meningkatkan pendapatan dan pekerjaan yang terus berkelanjutan bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

Ade Miranti Karunia, Akhdi Martin Pratama, Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2022/09/06/212000626/pemerintah-susun-peta-jalan-ekonomi-biru-untuk-keluar-dari-middle-income-trap-?lgn_method=google. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Susun Peta Jalan Ekonomi Biru untuk Keluar dari “Middle Income Trap” ", Kompascom+ baca berita tanpa iklan: Https://kmp.im/plus6, and Download aplikasi: Https://kmp.im/app6. 2022. “Pemerintah Susun Peta Jalan Ekonomi Biru Untuk Keluar Dari ‘Middle Income Trap’ Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul "Pemerintah Susun Peta Jalan Ekonomi Biru Untuk Keluar Dari ‘Middle Income Trap’ ", Klik Untuk Baca: Https://Money.Kompas.C.” *Kompas.com Money Whats New Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Susun Peta Jalan Ekonomi Biru untuk Keluar dari “Middle Income Trap” ", Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2022/09/06/212000626/pemerintah-susun-peta-ja*. https://money.kompas.com/read/2022/09/06/212000626/pemerintah-susun-peta-jalan-ekonomi-biru-untuk-keluar-dari-middle-income-trap-?lgn_method=google.

Ambari, M. 2017. “Pulau Lombok Jadi Kawasan Percontohan Penerapan Ekonomi Biru, Seperti Apa Itu.” *MONGABAY*. https://www.mongabay.co.id/2017/09/21/pulau-lombok-jadi-kawasan-percontohan-penerapan-ekonomi-biru-seperti-apa-itu/.

AQUINO, DAVID KACZANANDRÉ RODRIGUES DE. 2021a. “Empat Strategi

Untuk Ekonomi Biru Di Indonesia: Refleksi Dari Laporan Laut Untuk Kesejahteraan." *Published on East Asia & Pacific on the Rise*. https://blogs.worldbank.org/id/eastasiapacific/empat-strategi-untuk-ekonomi-biru-di-indonesia-refleksi-dari-laporan-laut-untuk.

———. 2021b. "Published on East Asia & Pacific on the Rise." *Published on East Asia & Pacific on the Rise*. https://blogs.worldbank.org/id/eastasiapacific/empat-strategi-untuk-ekonomi-biru-di-indonesia-refleksi-dari-laporan-laut-untuk#_ftn2 (November 30, 2023).

Budhiana, Nyoman. 2023. "Bali Contoh Penerapan Ekonomi Biru." *https://bali.antaranews.com/img/logo_ant_bali.png*. https://bali.antaranews.com/berita/23483/bali-contoh-penerapan-ekonomi-biru.

Cisneros-Montemayor, Andrés Miguel et al. 2022. "A Primer on the 'Blue Economy:' Promise, Pitfalls, and Pathways." *One Earth* 5(9): 982–86.

Fusco, Leah M., Marleen S. Schutter, and Andrés M. Cisneros-Montemayor. 2022. "Oil, Transitions, and the Blue Economy in Canada." *Sustainability (Switzerland)* 14(13).

M Ambari. 2023. "Meluruskan Kembali Konsep Ekonomi Biru Di Indonesia." *https://www.mongabay.co.id/*. https://www.mongabay.co.id/2023/04/07/meluruskan-kembali-konsep-ekonomi-biru-di-indonesia/.

Sambodo, Leonardo A.A. Teguh et al. 2023. *Indonesia Blue Economy Roadmap*. https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Unit_Kerja/Dir Industri%2C Ekonomi dan Kreatif/ENG_Indonesia Blue Economy Roadmap_ebook_ISBN.pdf.

Samimi, Mehdi, Andres Felipe Cortes, Marc H. Anderson, and Pol Herrmann. 2022. "What Is Strategic Leadership? Developing a Framework for Future Research." *Leadership Quarterly* 33(3): 101353. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2019.101353.

Singh, Anjali et al. 2023. "The State of the Art of Strategic Leadership." *Journal of Business Research* 158(November 2021): 113676. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113676.

Tirumala, Raghu Dharmapuri, and Piyush Tiwari. 2022. "Innovative Financing Mechanism for Blue Economy Projects." *Marine Policy* 139(August): 104194. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104194.

Ade Miranti Karunia, Akhdi Martin Pratama, Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2022/09/06/212000626/pemerintah-susun-peta-jalan-ekonomi-biru-untuk-keluar-dari-middle-income-trap-?lgn_method=google. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Susun Peta Jalan Ekonomi Biru untuk Keluar dari "Middle Income Trap" ", Kompascom+ baca berita tanpa iklan: Https://kmp.im/plus6, and Download aplikasi: Https://kmp.im/app6. 2022. "Pemerintah Susun Peta Jalan Ekonomi Biru Untuk Keluar Dari 'Middle Income Trap' Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com

Dengan Judul "Pemerintah Susun Peta Jalan Ekonomi Biru Untuk Keluar Dari ‘Middle Income Trap’ ", Klik Untuk Baca: Https://Money.Kompas.C." *Kompas.com Money Whats New Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Susun Peta Jalan Ekonomi Biru untuk Keluar dari “Middle Income Trap” ", Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2022/09/06/212000626/pemerintah-susun-peta-ja*. https://money.kompas.com/read/2022/09/06/212000626/pemerintah-susun-peta-jalan-ekonomi-biru-untuk-keluar-dari-middle-income-trap-?lgn_method=google.

Ambari, M. 2017. “Pulau Lombok Jadi Kawasan Percontohan Penerapan Ekonomi Biru, Seperti Apa Itu.” *MONGABAY*. https://www.mongabay.co.id/2017/09/21/pulau-lombok-jadi-kawasan-percontohan-penerapan-ekonomi-biru-seperti-apa-itu/.

AQUINO, DAVID KACZANANDRÉ RODRIGUES DE. 2021a. “Empat Strategi Untuk Ekonomi Biru Di Indonesia: Refleksi Dari Laporan Laut Untuk Kesejahteraan.” *Published on East Asia & Pacific on the Rise*. https://blogs.worldbank.org/id/eastasiapacific/empat-strategi-untuk-ekonomi-biru-di-indonesia-refleksi-dari-laporan-laut-untuk.

———. 2021b. “Published on East Asia & Pacific on the Rise.” *Published on East Asia & Pacific on the Rise*. https://blogs.worldbank.org/id/eastasiapacific/empat-strategi-untuk-ekonomi-biru-di-indonesia-refleksi-dari-laporan-laut-untuk#_ftn2 (November 30, 2023).

Budhiana, Nyoman. 2023. “Bali Contoh Penerapan Ekonomi Biru.” *https://bali.antaranews.com/img/logo_ant_bali.png*. https://bali.antaranews.com/berita/23483/bali-contoh-penerapan-ekonomi-biru.

Cisneros-Montemayor, Andrés Miguel et al. 2022. “A Primer on the ‘Blue Economy:’ Promise, Pitfalls, and Pathways.” *One Earth* 5(9): 982–86.

Fusco, Leah M., Marleen S. Schutter, and Andrés M. Cisneros-Montemayor. 2022. “Oil, Transitions, and the Blue Economy in Canada.” *Sustainability (Switzerland)* 14(13).

M Ambari. 2023. “Meluruskan Kembali Konsep Ekonomi Biru Di Indonesia.” *https://www.mongabay.co.id/*. https://www.mongabay.co.id/2023/04/07/meluruskan-kembali-konsep-ekonomi-biru-di-indonesia/.

Sambodo, Leonardo A.A. Teguh et al. 2023. *Indonesia Blue Economy Roadmap*. https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Unit_Kerja/Dir Industri%2C Ekonomi dan Kreatif/ENG_Indonesia Blue Economy Roadmap_ebook_ISBN.pdf.

Samimi, Mehdi, Andres Felipe Cortes, Marc H. Anderson, and Pol Herrmann. 2022. “What Is Strategic Leadership? Developing a Framework for Future Research.” *Leadership Quarterly* 33(3): 101353. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2019.101353.

Singh, Anjali et al. 2023. “The State of the Art of Strategic Leadership.” *Journal of*

Business Research 158(November 2021): 113676. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113676.

Tirumala, Raghu Dharmapuri, and Piyush Tiwari. 2022. “Innovative Financing Mechanism for Blue Economy Projects.” *Marine Policy* 139(August): 104194. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104194.

Ekonomi Biru dan Kepemimpinan Strategis: Mendorong Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

ORIGINALITY REPORT

19%
SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	ppid.bappenas.go.id Internet	135 words — 3%
2	pemilu.kompas.com Internet	86 words — 2%
3	supplychainindonesia.com Internet	83 words — 2%
4	lestari.kompas.com Internet	78 words — 2%
5	bisnis.tempo.co Internet	61 words — 1%
6	www.worldbank.org Internet	55 words — 1%
7	babelprov.go.id Internet	36 words — 1%
8	www.unika.ac.id Internet	24 words — 1%
9	123dok.com Internet	19 words — < 1%

10	etd.repository.ugm.ac.id Internet	16 words — < 1%
11	Shahibah Yuliani, Enok Maryani, Siti Nurbayani, Disman, Zahra Ziadhatun Nisa, Putri Wulandari, Anjani Luthfiah. "Analysis of “Blue Economy” Contents in Junior High School Social Science Book", JURNAL PENDIDIKAN IPS, 2023 Crossref	14 words — < 1%
12	baktinews.bakti.or.id Internet	14 words — < 1%
13	graduate.binus.ac.id Internet	14 words — < 1%
14	www.askara.co Internet	14 words — < 1%
15	www2.kemenkopmk.go.id Internet	14 words — < 1%
16	batamtoday.com Internet	12 words — < 1%
17	repository.uki.ac.id Internet	12 words — < 1%
18	repository.unhas.ac.id Internet	12 words — < 1%
19	greeneration.org Internet	10 words — < 1%
20	ti.or.id Internet	10 words — < 1%

21	www.antaranews.com Internet	10 words — < 1%
22	arahkata.pikiran-rakyat.com Internet	9 words — < 1%
23	tugaskampuss.blogspot.com Internet	9 words — < 1%
24	www.researchgate.net Internet	9 words — < 1%
25	La Ode Sabaruddin. "Penerapan Metode Instalasi Tangki Cryogenic Di Rumah Sakit Untuk Mewujudkan Konsep Green Economic Dalam Bentuk Green Logistic (Studi Kasus di PT. Sentosa Ultra Gasindo)", Majalah Ilmiah Bijak, 2020 Crossref	8 words — < 1%
26	Rifky Amri Amrullah. "Capacity Building for the Community of Air Anyir Village through Training on Processed Fish-Based Food Products", Prospect: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 2023 Crossref	8 words — < 1%
27	Verto Septiandika, Nurul Jannah Lailatul Fitria, Elok Hanifah. "Sosialisasi Blue Economy: Menanamkan Semangat Wirausaha Yang Berwawasan Lingkungan di Kota Probolinggo", Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia, 2022 Crossref	8 words — < 1%
28	anzdoc.com Internet	8 words — < 1%
29	media.neliti.com Internet	8 words — < 1%

30	sospol.untag-smd.ac.id Internet	8 words — < 1%
31	www.pikiran-rakyat.com Internet	8 words — < 1%
32	www.transformasi.org Internet	8 words — < 1%
33	Muhar Junef. "Implementasi Poros Maritim dalam Prespektif Kebijakan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Crossref	7 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES	ON	EXCLUDE SOURCES	OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY	ON	EXCLUDE MATCHES	OFF